



IKLAN KOMERSIAL DAN POLITIK MULAI BERTEBARAN

Ruang Publik Terancam Diprivatisasi 'Sampah Visual'

YOGYA (KR) - Ruang publik di Kota Yogya maupun kabupaten lain di DIY terancam diprivatisasi oleh keberadaan sampah visual. Terutama jika tidak ada tindakan tegas dan terukur dalam menegakkan aturan mengenai penyelenggaraan reklame. Hal ini karena berbagai jenis iklan komersial maupun propaganda politik kini mulai berkebar.

Menurut inisiator Reresik Sampah Visual yang juga Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta Dr Sumbo Tinarbuko, ruang publik sebenarnya merupakan haknya masyarakat serta dimiliki oleh masyarakat. Ketika akhirnya menjadi privat karena dipenuhi oleh sampah visual maka bisa berujung pada bencana sosial. "Ketika berkendara di jalan raya namun pandangan sudah sumpeg oleh berbagai serbuan iklan

dan ditambah lagi sumpeg oleh polusi udara maka orang akan semakin beringas ketika berkendara. Mereka juga akan mudah tersulut emosinya serta mudah stres. Ini bencana sosial," urainya, Jumat (14/4).

Serbuan sampah visual berupa aneka jenis iklan komersial dan iklan politik di wilayah Yogya, imbuhan Sumbo, tidak bisa terelakkan. Hal ini karena setiap sudut ruang publik di wilayah DIY memiliki nilai strategis. Layaknya gula dengan kualitas istimewa yang siap dilumat oleh jutaan semut berupa iklan luar ruang. Dirinya bahkan menyebut tiga daerah yakni Kota Yogya, Kabupaten Sleman dan Bantul saat ini bagaikan trio wilayah seribu kunang-kunang iklan luar ruang. Dalam waktu dekat juga bisa dialami oleh Gunungkidul dan Kulonprogo lantaran kini tengah tumbuh mekar.

Pada masa tahun politik, keberadaan sampah visual berpotensi semakin liar oleh keberadaan bendera parpol, spanduk caleg, rontek dan lain sebagainya, Pasalnya tempat promosi sangat terbatas hingga akhirnya menyerobot ruang publik. Tidak heran jelang lebaran kali ini banyak ditemukan berbagai spanduk dari parpol maupun tokoh masyarakat yang hendak berlaga dalam Pemilu 2024. Pemasangannya cenderung semrawut, bahkan saling tumpang tindih dengan spanduk lain karena berebut lokasi paling strategis. "Mending jika itu dipasang di tempat yang layak, tetapi banyak yang di pohon, tiang listrik, tiang telepon, dinding rumah, tempat ibadah bahkan sampai di taman, trotoar, jembatan hingga perkampungan. Ini yang dinamakan memprivatisasi ruang publik," tandas

Sumbo.

Serbuan sampah visual dari iklan komersial dan iklan politik itu pun kini sudah menjadi momok di Kota Yogya. Sebagai contoh beberapa simpang jalan setidaknya terdapat lebih dari tiga jenis spanduk iklan politik dan berdampingan dengan reklame komersial maupun promosi kegiatan atau event. Ketika tahapan pencalegan sudah dimulai, maka iklan propaganda politik diprediksi akan semakin gencar dan berpotensi merampas ruang publik. Kondisi tersebut, tandas Sumbo, bisa menjadi teroris visual bagi masyarakat dan menjadi ancaman serius bagi peradaban kota. "Warga masyarakat mempunyai hak kemerdekaan visual untuk memandang pemandangan alam, dan keunikan arsitektural tempo dulu secara bebas dan tak terhalangi," tegasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005